



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan: 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 2. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam); dan 3. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	13 (tiga belas)
Hari/Tanggal	:	Rabu, 6 Juni 2018
W a k t u	:	Pukul 11.00 s.d 13.55 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/FPAN), didampingi oleh: 1. H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPG); 2. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F.Gerindra); 3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ FPD).
Sekretaris Rapat	:	Eguh Setiawan, S.IP. (Plt. Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas RKA dan RKP BKPM, BP Batam, dan BPKS Sabang Tahun Anggaran 2019
Hadir	:	1. 28 dari 51 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Kepala BPKM beserta jajaran; 3. Kepala BP Batam beserta jajaran; 4. Kepala BPKS Sabang beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kepala BKPM, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS Sabang dibuka pukul 11.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja pada hari ini adalah dalam rangka membahas mengenai RKA dan RKP BKPM, BP Batam, dan BPKS Sabang Tahun Anggaran 2019, berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG/08529/DPR RI/V/2018 tanggal 2 Mei 2019.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Kepala BKPM, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS Sabang untuk menjelaskan RKA dan RKP BKPM, BP Batam, dan BPKS Sabang Tahun Anggaran 2019.

4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan atas penjelasan Kepala BKPM, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS Sabang.

II. KESIMPULAN

A. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

1. Komisi VI DPR RI meminta BKPM untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam Pagu Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp197.451.408.946,00 (*seratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI memahami pagu indikatif anggaran BKPM Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-269/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018, tanggal 16 April 2018, sebesar Rp516.060.891.000,00 (*lima ratus enam belas miliar enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), dengan rincian alokasi belanja sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM, sebesar Rp228.877.542.000,00 (*dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
 - b. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal sebesar Rp287.183.349.000,00 (*dua ratus delapan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran BKPM, sesuai Surat Nomor 223/A.1/2018 tanggal 30 Mei 2018, BKPM mengusulkan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2019 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, yaitu sebesar Rp200.000.000.000,00 (*dua ratus miliar rupiah*), sehingga dengan demikian total anggaran BKPM Tahun Anggaran 2019 menjadi sebesar **Rp716.060.891.000,00** (*tujuh ratus enam belas miliar enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

B. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

1. Komisi VI DPR RI meminta BP Batam untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam Pagu Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp1.741.551.191.000,00 (*satu triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI memahami pagu indikatif anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-269/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018, tanggal 16 April 2018, sebesar Rp1.832.418.909.000,00 (*satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah*) yang bersumber dari BLU/PNBP sebesar Rp1.624.835.445.000,00 (*satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp193.621.568.000,00 (*seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), dan Rupiah Murni Pendamping Pinjaman Luar Negeri (RMP-PHLN) sebesar Rp13.961.896.000,00 (*tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

3. Komisi VI DPR RI dapat memahami usulan perubahan dari sumber pembiayaan melalui PNBP pada Tahun 2019 dari Rp1.624.835.445.000,00 (*satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*) menjadi Rp1.254.414.280.000,00 (*satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar empat ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran BP Batam dari Rupiah Murni sebesar Rp565.000.000.000,00 (*lima ratus enam puluh lima miliar rupiah*) untuk membiayai pekerjaan yang mendukung prioritas nasional serta *cost sharing* dari sisi pemerintah dalam pengembangan infrastruktur model Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
 - a. Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, sebesar Rp340.000.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh miliar*).
 - b. Pengembangan Bandar Udara Hang Nadim, sebesar Rp150.000.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar rupiah*).
 - c. Pengembangan Rumah Sakit BP Batam, sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*).

Sehingga total anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2019 menjadi sebesar **Rp2.026.997.744.000,00** (*dua triliun dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah*) dengan alokasi per program:

- a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp826.828.136.000,00 (*delapan ratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- b. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB Batam, sebesar Rp1.200.169.608.000,00 (*satu triliun dua ratus miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah*).

C. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang)

1. Komisi VI DPR RI meminta BPKS Sabang untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam Pagu Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp224.864.020.000,00 (*dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua puluh ribu rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI memahami pagu indikatif anggaran BPKS Sabang Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-269/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/ KU.01.01/04/2018, tanggal 16 April 2018, sebesar Rp221.429.833.000,00 (*dua ratus dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp213.729.833.000,00 (*dua ratus tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) dan BLU BPKS Sabang sebesar Rp7.700.000.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah*) dengan alokasi per program:
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, sebesar Rp38.634.062.000,00 (*tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam puluh dua ribu rupiah*).
 - b. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB Sabang sebesar Rp175.095.771.000,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

3. Komisi VI DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran BPKS SABANG dari Rupiah Murni sebesar Rp226.000.000.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar rupiah*) yang akan digunakan, antara lain untuk pembangunan Sabang Water Front Harbors (WTH), sehingga total anggaran BPKS Sabang menjadi sebesar **Rp447.429.833.000,00** (*empat ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.55 WIB.